

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uni Eropa merupakan kemitraan ekonomi dan politik yang mewakili bentuk kerja sama antar negara yang pada awalnya dibentuk oleh enam negara Eropa Barat dengan tujuan untuk mendorong saling ketergantungan dan meminimalisir perang di Eropa. Saat ini Uni Eropa memiliki 27 negara anggota yang mencakup sebagian besar negara di Eropa Timur dan Tengah yang berupaya menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di seluruh kawasan Eropa.¹ Terkait pengambilan keputusan negara-negara anggota Uni Eropa tidak hanya terikat pada perjanjian, perundang-undangan, dan norma-norma (*acquis communautaire*), tapi juga terikat dengan seperangkat nilai-nilai bersama berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan keadilan sosial.² Terdapat aspek supranasionalitas yang dimiliki oleh Uni Eropa yaitu dalam pelaksanaan dan penerapan suatu keputusan negara-negara anggotanya menyerahkan sebagian dari kedaulatan negaranya ke Uni Eropa dan saat ini Uni Eropa juga menjadi organisasi kawasan yang paling terintegrasi di dunia serta integrasi kawasan merupakan tujuan utama yang dinyatakan oleh Uni Eropa sejak tahun 1970-an salah satunya melalui agenda perluasan wilayah.³

¹ Congressional Research Service, *The European Union: Questions and Answers*, 2024: 1.

² Michelle and Cini and Nieves Perez-Solorzano Borraran, "European Union Politics," (Oxford University Press, 2009): 3.

³ Tobias Lenz and Alexandr Burilkov, "Institutional Pioneers in World Politics: Regional Institution Building and the Influence of the European Union," *European Journal of International Relations* 23, no.3 (2017): 657.

Sejak awal terbentuknya Uni Eropa berupaya melanjutkan agenda perluasan wilayah yang tidak hanya mencakup negara-negara Eropa Barat, tapi juga mencakup negara-negara Eropa Timur dan Tengah.⁴ Uni Eropa memperluas wilayahnya hingga mencapai tujuh kali perluasan yang di mulai pada tahun 1973, Denmark, Inggris, dan Irlandia bergabung dengan Komunitas Eropa. Yunani bergabung 1981, diikuti Portugal dan Spanyol pada tahun 1986. Austria, Finlandia, dan Swedia menjadi negara anggota UE tahun 1995. Uni Eropa menambah sepuluh anggota pada tahun 2004 yaitu, Estonia, Hongaria, Lituania, Latvia, Polandia, Malta, Republik Ceko, Siprus, Slovakia, dan Slovenia. Pada 2007 Rumania dan Bulgaria menjadi negara anggota Uni Eropa, dan terakhir Kroasia bergabung pada tahun 2013.⁵ Namun, perluasan wilayah Uni Eropa yang paling signifikan terjadi pada tahun 2004 ketika Uni Eropa menerima sepuluh negara ke dalam keanggotaannya, sehingga kebijakan perluasan wilayah ini menjadi kisah sukses dan menjadi *enlargement* terbesar dalam sejarah Uni Eropa. Pencapaian hasil ini menjadi dasar transformasi kebijakan perluasan sebagai alat kebijakan luar negeri Uni Eropa.⁶

Uni Eropa memiliki peraturan yang tercantum dalam Pasal 49 Perjanjian Uni Eropa (TEU) yaitu negara Eropa manapun yang menghormati nilai-nilai umum negara-negara anggotanya dapat mengajukan permohonan keanggotaan

⁴ Denada Faraswacyen L. Goal, "Uni Eropa: Telaah Kritis antara Pencapaian Kepentingan Nasional dan Kepentingan Kawasan," *Transnasional* 11, no. 1 (2016): 39.

⁵ Kristin Archick, "The European Union: Questions and Answers," *Current Issues in US-European Relations* (2021): 6.

⁶ Mirela Veleva-Eftimova, "The EU Eastern Enlargement Policy Under the Pressure of Geopolitics. The Bulgarian Case (Russia's Little Brother)," *Studia Europejskie Studies in European Affairs* 27, no. 1 (2023): 64.

Uni Eropa.⁷ Peraturan ini menandakan Uni Eropa membuka peluang bagi negara yang ingin bergabung ke Uni Eropa. Ketika terdapat negara yang mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa dapat diberikan status kandidat oleh Dewan Eropa atas rekomendasi dari Komisi Eropa. Komisi melakukan pemeriksaan terkait permohonan yang didasarkan pada kriteria akses (kriteria Kopenhagen) dan membuat opini, selanjutnya Dewan Eropa memberikan keputusan terkait pemberian status kandidat dan pembukaan negosiasi akses dengan negara kandidat.⁸

Salah satu negara yang berupaya mendapatkan keanggotaan di UE adalah Ukraina. Uni Eropa pada tanggal 2 Desember 1991 mengundang Ukraina untuk berdialog, sehari setelah masyarakat Ukraina menyatakan keinginannya untuk hidup di negara merdeka atas dasar referendum yang menjadi awal dari hubungan bagi kedua belah pihak.⁹ Uni Eropa juga mengakui pilihan serta aspirasi Ukraina di Eropa sebagai negara Eropa yang mempunyai sejarah dan nilai-nilai yang sama dengan Uni Eropa, serta adanya tujuan perjanjian yang mencakup pembentukan asosiasi, pemulihan hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina berdasarkan nilai-nilai bersama, memperdalam hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan, meningkatkan kerjasama di bidang keadilan, kebebasan, dan keamanan.¹⁰ Selain itu, Uni Eropa juga memandang Ukraina sebagai negara mitranya terutama sejak

⁷ Milos Petrovic, "European Union and Ukraine: The Strategic Partnership Leading to Somewhere," *International Problems* 74, no.1 (2022): 85-86.

⁸ European Commission, "European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR)", diakses pada 02 Juni 2024 melalui https://neighbourhood-enlargement.ec.eu/enlargement-policy/glossary/candidate-countries_en.

⁹ Iona Sologoub, "Ukraine's EU Integration: A Long Way Home," *Intereconomics*, 57, no. 4 (2022): 218.

¹⁰ Svitlana Holovko and Kateryna Vodolaskova, "Eu-Ukraine Relations Development Policy: Historical Background and Current State," *Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal Air and Space Law* 2, no. 63 (2022): 38.

adanya Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Ukraina yang mencakup Kawasan Perdagangan Bebas Komprehensif dan Mendalam yang ditandatangani pada 2014 dan mulai berlaku pada tahun 2017 sehingga hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa telah mencapai tingkat kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.¹¹

Ukraina pada masa Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa empat hari setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.¹² Aplikasi permohonan keanggotaan Ukraina ke Uni Eropa yaitu Ukraina pada 28 Februari 2022 menyampaikan permohonan keanggotaan ke UE, Komisi Eropa pada 17 Juni 2022 menyampaikan pendapatnya dan Dewan Eropa memberikan Ukraina status sebagai negara kandidat tanggal 23 Juni 2022,¹³ yang dinyatakan oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada 23 Juni 2022 yaitu, *“The European Council has just decided European Union candidate status for Ukraine and Moldova. This is a historical moment. Today marks a crucial step on your path towards the European Union. Our future is together”*.¹⁴ Status kandidat merupakan langkah resmi pertama dari suatu negara yang mengajukan permohonan untuk menjadi negara anggota Uni Eropa.¹⁵

Suatu negara harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin menjadi anggota UE yaitu, pertama lembaga yang stabil untuk menjamin terciptanya

¹¹ European Commission, “European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR)”, diakses pada 01 Juni 2024 melalui https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/ukraine_en.

¹² Houma Siddiqi, “EU Fast Track Membership: Can It Help Ukraine Resolve Its Real Problem,” *Margalla Papers* 27, no.1 (2023): 13.

¹³ European Council, “Ukraine,” diakses pada 19 April 2024 melalui <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/ukraine/>.

¹⁴ European Council, “European Council, 23-24 June 2022,” diakses pada 06 April 2024 melalui <https://www.consilium.europa.eu/en/meeting/european-council/2022/06/23-24/>.

¹⁵ Politico, “Big Deal: What Does EU Candidate Status Actually Mean for Ukraine?,” diakses pada 15 Februari 2024 melalui <https://www.politico.eu/article/why-eu-membership-candidate-status-matters-for-ukraine/>.

demokrasi, supremasi hukum, HAM dan melindungi kaum minoritas. Kedua ekonomi pasar yang aktif dan kemampuan dalam mengatasi perlawanan dan kekuatan pasar UE. Ketiga kapasitas dalam melaksanakan ketentuan keanggotaan dengan efektif, terutama loyalitas terkait arah persatuan politik, ekonomi, dan moneter.¹⁶ Selanjutnya, jika dilihat secara administratif negara yang ingin mengajukan permohonan keanggotaan harus mengikuti tiga tingkatan yaitu: pertama, sebagai kandidat potensial, kedua sebagai negara kandidat, dan ketiga sebagai negara anggota resmi. Akan tetapi, jika dilihat mengenai Ukraina, negara ini ditempatkan pada posisi negara kandidat atau calon anggota oleh Uni Eropa yang tidak sesuai dengan tingkatan dalam keanggotaan Uni Eropa.¹⁷

Selain itu, Uni Eropa juga menunjukkan keengganan untuk menawarkan keanggotaan kepada negara-negara di Eropa Timur dan Balkan serta Uni Eropa sebelumnya juga menandai Ukraina sebagai mitra yang tidak layak.¹⁸ Namun pada saat Ukraina mengajukan permohonan keanggotaan, UE segera memberikan Ukraina status sebagai negara kandidat. Dengan adanya pemberian status kandidat kepada Ukraina yang tidak sesuai dengan proses tingkatan dalam keanggotaan UE dan Ukraina yang pada awalnya ditandai sebagai mitra yang tidak layak oleh UE, menjadi menarik diteliti mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat kepada Ukraina.

¹⁶ European Commission, "Conditions for Membership," diakses pada 18 Mei 2024 melalui https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/conditions-membership_en.

¹⁷ Eska Dwipayana Pulungan, "The Widening of European Union to Post Soviet Countries: Case Study of Bulgaria Acceptance and Ukraine Accession," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 3 (2023): 797.

¹⁸ Houma Siddiqi, "EU Fast Track Membership: Can It Help Ukraine Resolve Its Real Problem?," *Margalla Papers* 27, no. 1 (2023): 14.

1.2. Rumusan Masalah

Uni Eropa saat ini menjadi organisasi regional yang paling terintegrasi dan memiliki kisah sukses dalam perluasan keanggotaan. Namun, terlepas dari hal itu terdapat kejanggalan terkait pertimbangan Uni Eropa dalam memberikan Ukraina status sebagai negara kandidat Ukraina pada tanggal 23 Juni 2022 hal ini dikarenakan Uni Eropa memberikan status kandidat kepada Ukraina yang tidak sesuai dengan tingkatan dalam keanggotaan Uni Eropa yaitu kandidat potensial, negara kandidat, dan negara anggota resmi. Uni Eropa langsung menempatkan Ukraina pada posisi negara kandidat. Selain itu, UE juga memiliki keengganan untuk menawarkan keanggotaanya kepada negara-negara di Eropa Timur dan Balkan serta Ukraina sebelumnya ditandai sebagai mitra yang tidak layak oleh Uni Eropa, dengan adanya hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah ini, pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Dalam konteks akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan untuk mengembangkan keilmuan Hubungan Internasional untuk mahasiswa terutama terkait konteks kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber rujukan bagi berbagai kalangan khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dalam kajian organisasi internasional terutama mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

1.6. Studi Pustaka

Tulisan pertama merujuk pada artikel yang berjudul *Perspective of Ukraine's Integration Into the European Union State of Development and New Challenges* yang ditulis oleh Natalia Rozmaritsyna pada tahun 2023. Tulisan ini secara singkat menjelaskan tentang sejarah perkembangan integrasi Ukraina ke dalam Uni Eropa dan tantangan yang dihadapi oleh Ukraina. Relasi yang terjalin antara UE dengan Ukraina telah mengalami perkembangan yang signifikan selama bertahun-tahun. Ukraina sejak awal kemerdekaan tahun 1991 sudah menyatakan aspirasinya agar sejalan dengan nilai-nilai, prinsip, dan institusi Eropa, serta berupaya untuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa. Selama periode tahun 1991 hingga 1994, hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa mengalami perkembangan yaitu Desember 1991 Uni Eropa mengeluarkan deklarasi tentang pengakuan terhadap sifat demokratis referendum Ukraina,

mengakui kemerdekaan Ukraina, dan mendukung Ukraina menuju demokrasi dan integrasi ke Uni Eropa. Pada periode tahun 1994 hingga 2009 kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama. Pada tahun 2009 sampai sekarang, terdapat persiapan inisiasi, penandatanganan, ratifikasi, dan pelaksanaan dari *Association Agreement* antara kedua mitra ini. Penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Asosiasi EU-Ukraina tahun 2014 berlaku pada 1 September 2017 dan amandemen Undang-undang Dasar pada 7 Februari 2019 oleh Verkhovna Rada semakin memperkuat tujuan strategis Ukraina dalam memperoleh keanggotaan penuh Uni Eropa. Terlepas dari adanya kemajuan dari proses integrasi Ukraina ke Uni Eropa terdapat tantangan yang dihadapi oleh Ukraina yaitu masalah sosio-ekonomi yang kompleks, institusi demokrasi yang masih lemah, dan adanya tekanan dari Rusia yang mendorong Ukraina untuk melakukan integrasi dengan Eurasia.¹⁹

Tulisan ini layak untuk peneliti jadikan sebagai referensi dalam melihat dinamika hubungan kerja sama antara Uni Eropa dengan Ukraina. Tulisan ini memaparkan mengenai berbagai perjanjian kerjasama yang sudah dijalankan oleh Uni Eropa-Ukraina serta adanya upaya integrasi yang dilakukan oleh Ukraina ke Uni Eropa. Tulisan ini dapat membantu penulis dalam melihat dinamika hubungan yang terjalin antara Uni Eropa dengan Ukraina. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

¹⁹ Natalia Rozmaritsyna, "Perspective of Ukraine's Integration Into the European Union: State of Development and New Challenges" (2023): 398–408.

Tulisan kedua merujuk pada artikel yang berjudul *European Union and Ukraine the Strategic Partnership Leading to Somewhere* yang ditulis oleh Milos Petrovic pada tahun 2022. Tulisan ini secara singkat menjelaskan mengenai sifat perkembangan hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa terutama sejak awal dekade kedua abad ke-21. Kedua belah pihak telah lama menjalin hubungan kerjasama melalui kebijakan lingkungan dan inisiatif strategis Kemitraan Timur, akan tetapi ambisi utama Ukraina tetap berfokus untuk mendapatkan perspektif keanggotaan dari Uni Eropa. Dengan adanya aksi protes yang dikenal dengan gerakan Euromaidan yang mendapat dukungan dari Uni Eropa menyebabkan Presiden Viktor Yanukovich lengser dari jabatannya dan digantikan oleh presiden yang pro-Barat. Ukraina berkembang menjadi salah satu anggota Kemitraan Timur yang sangat menonjol dan ambisius sehingga dapat mengintensifkan hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa telah mendapatkan pengaruh strategis dengan mengundang pemerintah Ukraina setelah Euromaidan untuk menandatangani Perjanjian Asosiasi pada tahun 2014 sehingga kerja sama antara Uni Eropa dengan Ukraina mulai mengalami peningkatan.²⁰

Tulisan ini layak untuk peneliti jadikan sebagai referensi dalam melihat dinamika hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina terutama sejak abad ke-21, kebijakan lingkungan Eropa, dan kebijakan Kemitraan Timur. Tulisan ini dapat membantu penulis dalam melihat dinamika kerja sama EU-Ukraina. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kebijakan luar negeri UE terkait pemberian status negara kandidat ke Ukraina.

²⁰ Milos Petrovic, "European Union and Ukraine the Strategic Partnership Leading to Somewhere," *International Problems* 74, no 1 (2022): 75–101.

Tulisan ketiga merujuk pada artikel yang berjudul *State Building and European Integration in Ukraine* yang ditulis oleh Kataryna Wolczuk pada tahun 2019. Tulisan ini menjelaskan mengenai setelah terjadinya peristiwa Euromaidan tahun 2014, asosiasi yang terjalin UE dengan Ukraina mulai mengalami perubahan. Setelah Euromaidan UE mulai memberikan dukungan terhadap aspirasi Ukraina dalam memasuki “integrasi ekonomi dan asosiasi politik” dengan ditandatanganinya *Association Agreement* antara kedua belah pihak. Uni Eropa juga mendukung reformasi administrasi publik dan memberikan bantuan terkait pengembangan kapasitas di pemerintahan Ukraina. Selain itu, sejak tahun 2014 ini integrasi Eropa dapat dipahami sebagai membangun kembali struktur di Ukraina. Oleh karena itu, integrasi Eropa bagi Ukraina sangat penting lebih dari sekedar pengimplementasian *Association Agreement*, namun lebih difokuskan pada reformasi secara menyeluruh terkait struktur negara Ukraina. Relasi Uni Eropa dengan Ukraina semakin erat terutama dengan adanya *Deep and Comprehensive Free Trade Area* atau DCFTA. Uni Eropa memiliki pengaruh aktif dalam peningkatan manfaat politik dan ekonomi dalam keanggotaannya. Akan tetapi, pengaruh pasif Uni Eropa lebih terlihat mengenai negara kandidat UE pada masa yang akan datang dengan mendeklarasikan keanggotaan Uni Eropa menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri termasuk Ukraina. Peningkatan kapasitas negara di Eropa Timur dan Tengah memiliki dampak positif dalam kapasitas administratif dari pembuatan kebijakan secara umum dan implementasi akuisisi Uni Eropa pada khususnya.²¹

²¹ Katarynaa Wolczuk, “State Building and European Integration in Ukraine,” *Eurasia Geography and Economics* 60, no 6 (2019): 736-754.

Tulisan ini dapat peneliti jadikan sebagai referensi dalam melihat dinamika relasi Uni Eropa dan Ukraina terutama setelah terjadinya gerakan Euromaidan dan adanya Kawasan Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif yang mendukung kedekatan hubungan antara kedua belah pihak. Tulisan ini memaparkan mengenai pembangunan negara dan integrasi Eropa di Ukraina. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

Tulisan keempat merujuk pada artikel yang berjudul *Ukraine's Membership Application as a Trigger to Reform the European Enlargement Policy* yang ditulis oleh N. Yu. Kavesnikov pada tahun 2022. Tulisan ini menjelaskan mengenai proses perluasan Uni Eropa secara berturut-turut memiliki dampak kualitatif terhadap sifat organisasi integrasi, yang memberikan perubahan terkait agenda dan prioritas, institusi, dan proses pengambilan keputusan, serta mengubah sikap dari aktor internasional mengenai Uni Eropa. Terdapat dua aspek perubahan dari Uni Eropa yaitu 1) geopolitisasi kebijakan perluasan dan 2) perkembangan proses diferensiasi dan prospek yang memunculkan perluasan baru. Munculnya keseimbangan baru antara kepentingan dan nilai-nilai sesuai dengan "pragmatisme berprinsip" yang mencerminkan terjadinya pergeseran tujuan transformasi mitra (negara tetangga) menuju pendekatan yang lebih realistis dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan negara mitra. Selanjutnya kebijakan perluasan telah meningkatkan unsur diferensiasi Uni Eropa, dan

semakin berkembangnya integrasi diferensiasi eksternal yang lebih maju dengan negara-negara kandidat.²²

Tulisan ini layak untuk peneliti jadikan sebagai referensi dalam melihat transformasi kebijakan perluasan Uni Eropa. Tulisan ini dapat membantu penulis dalam menambah informasi mengenai perubahan kebijakan perluasan Uni Eropa. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

Tulisan kelima merujuk pada artikel yang berjudul *Debordering and Rebordering the EU After the Russian Invasion to Ukraine*, yang ditulis oleh Agnieszka Cianciara Cianciara pada tahun 2023. Artikel ini menjelaskan mengenai dinamika dari kebijakan perluasan Uni Eropa saat ini yang dibentuk melalui adanya guncangan eksternal yang disebabkan oleh adanya invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Artikel ini berpendapat bahwa tekanan-tekanan eksternal dapat menjadi peluang dari kebijakan perluasan. Berdasarkan penelitian terbaru dari Frank Schimmelfennig tahun 2021 yang berargumentasi bahwa dinamika perluasan wilayah baru dijelaskan menggunakan konsep *bordering*. Secara lebih konkrit penelitian ini menekankan pada strategi *de-bordering* dan *re-bordering* eksternal Uni Eropa yang dilakukan oleh aktor-aktor politiknya dengan mengubah konstelasi perbatasan. Analisis dalam artikel ini mengungkapkan

²² N. Yu. Kavesnikov, "Ukraine's Membership Application as a Trigger to Reform the European Union Enlargement Policy," *Herald of the Russian Academy of Sciences* 92, no. 6 (2022): S651-S659.

adanya dinamika kebijakan perluasan Uni Eropa saat ini dibentuk oleh invasi Rusia terhadap Ukraina.²³

Artikel ini layak untuk dijadikan sebagai referensi karena di dalam artikel ini membahas mengenai *de-bordering* dan *re-bordering* dengan Uni Eropa. Artikel ini dapat membantu penulis dalam melihat dinamika kebijakan perluasan Uni Eropa yang dapat menambah informasi dalam penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

1.7. Kerangka Konseptual

Penggunaan teori atau konsep sangat dibutuhkan untuk membantu peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang diangkat agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan teori *Foreign Policy Analysis*, hal ini dikarenakan teori ini dapat membantu peneliti dalam menjawab pernyataan dalam penelitian ini.

1.7.1. *Foreign Policy Analysis*

Peneliti menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* J.F Morin dan J. Paquin dalam penelitian ini, teori ini berupaya untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana satu atau lebih otoritas publik dalam mengadopsi suatu kebijakan tertentu dalam kondisi tertentu.²⁴ J.F Morin dan J. Paquin memberikan penjelasan bahwa dalam menganalisis suatu kebijakan luar negeri dapat dilakukan

²³ Agnieszka K. Cianciara, "Debordering and Rebordering the EU After the Russian Invasion to Ukraine", *Studia Europejskie Studies in European Affairs* 2022, no 4 (2023): 41-56.

²⁴ Jean-Frederic Morin and Jonathan Paquin, "Foreign Policy Analysis" (Springer Nature, 2018), 2.

melalui lima tolak ukur, yaitu *goals of foreign policy, mobilized resources, instruments of foreign policy, the process of foreign policy, and the outcome of foreign policy*:²⁵

1. *Goals of Foreign Policy*

Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam melihat tujuan kebijakan luar negeri yaitu dengan mempertimbangkan bahwa tujuan yang dikomunikasikan oleh pemimpin sebenarnya adalah tujuan yang ingin dikejar atau menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai didasarkan pada perilaku dari para pemimpin. Ada beberapa cara dalam menganalisis tujuan kebijakan luar negeri yaitu melalui tujuan yang dikomunikasikan, doktrin, kepentingan nasional, dan menyimpulkan tujuan kebijakan luar negeri.²⁶

a) *The Goals Communicated*, dalam mengidentifikasi tujuan dari *foreign policy* dapat dilihat melalui deklarasi publik pemerintah. Misalnya melalui pernyataan kebijakan, pidato resmi, laporan pemerintah kepada parlemen, dan kertas putih yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Ketika suatu tujuan tertentu dikomunikasikan, akan memunculkan pertanyaan bagi para analis terkait apakah terdapat perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dengan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai.

b) *Doctrine*, cara lain yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi kebijakan luar negeri suatu pemerintah yaitu dengan mencari doktrin. Doktrin dapat dipahami sebagai seperangkat keyakinan, aturan, dan

²⁵ Morin and Paquin, "Foreign Policy Analysis": 19.

²⁶ Morin and Paquin, "Foreign Policy Analysis": 19-24.

prinsip yang menjadi acuan dalam kebijakan luar negeri. Doktrin dirangkum dalam sebuah pernyataan atau dokumen resmi untuk mengkomunikasikan prioritas dan tujuan dari suatu pemerintah kepada masyarakat dalam negeri dan kepada aktor-aktor lain. Akan tetapi, doktrin tidak selalu dinyatakan secara eksplisit oleh sebab itu, doktrin dapat memberikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dari strategi kebijakan luar negeri yang digunakan oleh suatu pemerintah dari waktu ke waktu.

c) *National Interest*, para pemimpin politik sering bersembunyi di balik gagasan kepentingan nasional pada saat diminta untuk menentukan tujuan dari kebijakan luar negerinya. David Callahan menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam memahami kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara-negara demokratis yaitu “kebutuhan” dan “keinginan” pemerintah. Kebutuhan merupakan kepentingan vital bagi negara yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara. Sedangkan keinginan mengarah pada keinginan negara yang tidak berdampak secara langsung terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

d) *Deducing the Goals Pursued*, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menyimpulkan tujuan dari kebijakan luar negeri dapat dilihat melalui perilaku aktor dibandingkan dengan mengandalkan tujuan yang dinyatakan secara publik. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah menganalisis hasil. Jika suatu kebijakan dipertahankan dalam waktu yang lama dan para pengambil kebijakan memiliki banyak peluang dalam menilai dan memodifikasi kebijakan tersebut, sehingga dapat

disimpulkan bahwa hasil tersebut memiliki kesesuaian terkait tujuan yang telah ditetapkan.

2. *Mobilized Resources*

Kekuasaan merupakan salah satu konsep dasar dalam hubungan internasional, namun juga menjadi konsep yang sulit didefinisikan. Raymond Aron analisis yang mengusulkan visi kekuasaan yang jelas. Menurutnya, ini bukan masalah kepemilikan sumber daya, akan tetapi mengenai mobilisasi sumber daya yang mempertimbangkan suatu struktur. Terdapat 3 hal dalam mobilisasi sumber daya yaitu:²⁷

- a. *Resources*, dipahami sebagai modal yang dapat dimobilisasi oleh suatu aktor, misalnya wilayah, populasi, dan sumber daya alam. Sumber daya dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan luar negeri.
- b. *The Power Paradox*, memberikan pengaruh tidak hanya bergantung pada banyaknya jumlah sumber daya yang dimiliki dibandingkan aktor lain dalam domain tertentu. Aktor tidak selalu sukses dalam mengubah sumber daya menjadi pengaruh. Hal ini disebut sebagai “paradoks kekuasaan” oleh beberapa analisis kebijakan luar negeri.
- c. *Mobilization and Exploitation*, adanya perbedaan antar aktor terkait strategi mobilisasi dibandingkan strategi eksploitasi. Mobilisasi merupakan transformasi sumber daya yang tersedia yang menghasilkan kekuatan tambahan. Sedangkan, eksploitasi merupakan transformasi

²⁷ Morin dan Paquin, “Foreign Policy Analysis”: 27-31.

kekuasaan menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri. Setiap aktor menggunakan kedua strategi ini secara bersamaan, akan tetapi keseimbangan antara kedua strategi ini berbeda-beda disesuaikan dengan preferensi masing-masing aktor.

3. *Instruments of Foreign Policy*

Instrumen digunakan sebagai acuan dalam melaporkan variasi kebijakan luar negeri dari waktu ke waktu. Terdapat tiga hal dari instrumen yaitu:²⁸

- a) *Socialization*, dipahami sebagai transfer kekayaan, nilai-nilai, dan ide-ide dari suatu aktor kepada aktor lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Risse, “*ideas do not float freely*”. Ide-ide tersebut dipromosikan secara efektif yang dipromosikan oleh aktor-aktor tertentu, terutama pada tahap awal penyebarannya.
- b) *Coercion*, tindakan koersif ditujukan untuk mempengaruhi perilaku negara sasaran dengan mengubah cara menghitung kepentingannya, namun tidak melakukan intervensi secara langsung di wilayah asing dan mengacu pada idiom “wortel dan tongkat” dengan membedakan antara instrumen koersif yang menggunakan sanksi positif berbasis imbalan dan instrumen yang menggunakan sanksi negatif yaitu strategi berbasis hukuman.
- c) *Intervention*, setiap intervensi merupakan bentuk serangan terhadap urusan dalam negeri negara asing untuk menghasilkan perubahan

²⁸ Morin and Paquin, “Foreign Policy Analysis”: 32-41.

struktural internal. Intervensi politik memiliki target subversi dengan memberikan dukungan terhadap kelompok pembangkang atau mendukung kekuasaan penguasa yang lemah.

d) *Event-based databases*, jelasnya sosialisasi, pemaksaan, dan intervensi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri memiliki kecenderungan untuk menggabungkan instrumen-instrumen yang berbeda jika dibandingkan dengan hanya memilih antara instrumen-instrumen tersebut. Ketika beberapa instrumen ini digunakan secara bersamaan, maka analisis perlu melihat tingkat kerja sama antara para pihak. Selanjutnya secara teknik basis data berbasis peristiwa dihasilkan melalui beberapa peristiwa yang dilaporkan di surat kabar dan setiap peristiwa dicatat dalam skala kerjasama tertentu.

4. *The Process of Foreign Policy*

Dalam kebijakan luar negeri terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh otoritas eksekutif, kekuasaan legislatif pada umumnya tidak terlibat secara langsung, kelompok kepentingan kurang aktif, dan perdebatan kurang transparan jika dibandingkan dengan kebijakan publik lainnya. Pada bagian ini terdapat segmentasi proses pengambilan keputusan.²⁹

Dalam perumusan kebijakan luar negeri terdapat 6 siklus yaitu:³⁰

a) *Framing*, merupakan tahap pertama dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Suatu permasalahan harus dibentuk terlebih dahulu oleh satu atau

²⁹ Morin and Paquin, "Foreign Policy Analysis": 41.

³⁰ Morin and Paquin, "Foreign Policy Analysis": 42.

lebih pembuat kebijakan agar permasalahan tersebut dapat dibingkai menjadi isu politik dan beralih dari dunia objektivitas menuju dunia intersubjektivitas.

b) *Setting agenda*, tahap kedua pada siklus ini yaitu penetapan agenda. Para pemimpin politik menghadapi serangkaian pertanyaan dan tidak bisa memeriksa setiap pertanyaan secara masuk akal. Terkait beberapa kasus dibutuhkan agar dapat menciptakan peluang politik sehingga isu baru dapat dimasukkan ke dalam agenda.

c) *Options*, tahap ketiga adalah kerangka kerja dan peluang politik menjadi hal yang menentukan terkait otoritas politik dalam berbagai pilihan kebijakan. Para ahli yang meliputi pegawai negeri, penasihat, dan ilmuwan, dapat menggantikan aktivis, reporter, atau pelobi yang pada awalnya membingkai isu tersebut.

d) *Decision*, pada tahap keempat pengambil keputusan diminta untuk memberikan pendapatnya terkait sejumlah pilihan terbatas. Tahap ini sangat penting dalam analisis kebijakan luar negeri yang secara khusus melibatkan penentuan unit pengambilan keputusan.

e) *Implementation*, administrasi publik memiliki tanggung jawab terkait bagaimana pengambilan keputusan diinterpretasikan, diimplementasikan, dan disesuaikan dengan keadaan eksternal. Namun, pada tahap kelima pemerintah telah melakukannya tidak selalu mempunyai kemampuan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dapat diterjemahkan secara sempurna ke dalam hasil yang lebih nyata.

f) *Evaluation*, tahap terakhir dari siklus ini adalah evaluasi. Dalam kebijakan luar negeri evaluasi terbuka terhadap interpretasi hal ini dikarenakan hasil umumnya tersebar dan multikausal.

5. *The Outcome of Foreign Policy*

Dalam mempelajari kebijakan luar negeri dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan praktis dan teoritis. Menilai efektivitas relatif dari berbagai tindakan kebijakan luar negeri dapat memunculkan pertanyaan tentang kondisi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam tindakan tersebut. Terdapat empat hal dalam mengukur hasil kebijakan luar negeri yaitu:³¹

a) *Measuring effectiveness*, terdapat berbagai penelitian tentang efektivitas sanksi ekonomi yang menyimpulkan bahwa sanksi tersebut jarang mencapai tujuannya. Argumen kuantitatif Hufbauer, Schott, dan Elliott memunculkan perdebatan metodologis intens. Misalnya, pendekatan ini tidak mempertimbangkan kasus-kasus ketika sanksi sudah dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan sebelum diberhentikan dikarenakan adanya resiko kegagalan. Akan tetapi, pendekatan kuantitatif Hufbauer, Schott, dan Elliott dapat digunakan dalam melakukan reorientasi penelitian terkait efektivitas kebijakan luar negeri.

b) *Feedback effects*, dipahami sebagai pesan mengenai tindakan aktor yang dikirim kembali oleh sistem kepada aktor atau pesan mengenai keadaan sistem yang dikirim kembali oleh aktor ke sistem. Terdapat dua jenis

³¹ Morin and Paquin, "Foreign Policy Analysis": 46-52.

umpan balik yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Jika umpan balik negatif terjadi, maka dampak kebijakan luar negeri dapat melemahkan keberadaan kebijakan luar negeri tersebut. Sebaliknya, umpan balik positif dapat membantu menjelaskan penguatan bertahap kebijakan luar negeri.

c) *Historical institutionalism* merupakan teori yang menggunakan konsep umpan balik dalam menjelaskan kebijakan luar negeri. Institusionalisme historis berfokus pada fenomena ketergantungan jalur yaitu pada kendala-kendala yang muncul dari keputusan-keputusan di masa lalu terhadap keputusan saat ini.

d) *Explaining effectiveness*, terkait sanksi ekonomi, sebagian besar analisis beranggapan bahwa variabel penjelas utama dalam menentukan efektivitas sanksi, berada pada tingkat nasional. Faktor penentu dalam keberhasilan sanksi adalah dampak ekonomi bagi negara yang dikenai sanksi, yang dihitung sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) dari negara tersebut.

Berdasarkan penjabaran dari teori kebijakan luar negeri di atas, penulis berpandangan bahwa teori kebijakan luar negeri menurut Morin dan Paquin dapat penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori ini dapat membantu dalam menganalisis kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina. Penulis akan memilah bagian mana yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ingin penulis teliti.

1.8. Metode Penelitian

Secara epistemologis, metodologi dipahami sebagai serangkaian prosedur terkait bagaimana suatu pengetahuan mengenai fenomena dalam Hubungan Internasional dapat diperoleh.³² Metode penelitian merupakan sekumpulan dari cara penelitian yang diaplikasikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan.³³ Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan bersifat induktif sehingga para peneliti pada umumnya menjelaskan makna dan wawasan dari suatu situasi yang terjadi.³⁴ Secara lebih sederhana, penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi melalui fakta-fakta yang ada di lapangan dan tidak dilakukan dengan cara kuantitatif (menggunakan angka atau data statistik sebagai sumber), akan tetapi menggunakan data-data non angka, misalnya, dokumen resmi, artikel jurnal, naskah, dan pidato.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang berupaya untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan dalam suatu penelitian sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami serta dengan menggunakan teori yang tepat menyesuaikan dengan suatu fenomena dalam

³² Mohtar Masoed, *“Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”*, (LP3ES: Jakarta, 1990): 3.

³³ Mohtar Masoed, *“Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”*.

³⁴ Haradhan Mohajan, Devajit Mohajan, and Haradhan Kumar Mohajan, “Munich Personal RePEc Archive Development of Grounded Theory in Social Sciences: A Qualitative Approach,” no. 115552 (2022): 1.

penelitian.³⁵ Peneliti menggunakan penelitian dengan jenis deskriptif-analisis. Penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai fenomena yang akan diteliti melalui perilaku atau kebijakan yang diambil oleh suatu aktor. Peneliti menggunakan penelitian ini dalam menganalisis kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian berguna dalam membantu penulis agar tetap fokus dalam melakukan penelitian sehingga cakupan penelitian dapat disesuaikan dengan batasan yang sudah peneliti tetapkan. Adapun batasan penelitian yang peneliti tetapkan adalah antara tahun 2022 hingga 2023. Tahun 2022 dijadikan sebagai tahun awal penelitian karena pada tahun ini Uni Eropa memberikan status kandidat kepada Ukraina. Pada tahun 2023 dijadikan sebagai tahun akhir penelitian karena pada tahun ini Uni Eropa memasukkan Ukraina untuk pertama kalinya ke dalam agenda perluasan wilayahnya.

1.8.3. Unit Analisis dan Level Analisis

Unit analisis dapat dipahami sebagai suatu unit yang perilakunya akan dianalisis atau dikenal dengan *dependent variable*.³⁶ Unit analisis pada penelitian ini yaitu kebijakan luar negeri Uni Eropa. Sedangkan, unit eksplanasi adalah suatu unit dengan memberikan pengaruh terhadap perilaku dari unit analisis atau dikenal dengan *independent variable*. Unit eksplanasi dalam penelitian ini yaitu

³⁵ John W. Cresswell and J. David Cresswell, "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" (Sage Publications Inc: United States of America, 2018): 162.

³⁶ Mohtar Masoed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES: Jakarta,1990): 35.

pemberian status kandidat Uni Eropa terhadap Ukraina. Selanjutnya, mengenai tingkat analisis John Spanier membagi tingkat analisis menjadi tiga yaitu tingkat sistem, tingkat negara, dan tingkat individu atau pembuat kebijakan.³⁷ Penelitian ini menetapkan tingkat analisis pada tingkat sistem karena melibatkan organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui *primary data* dan *secondary data*. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dari informan secara langsung sementara itu, data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh melalui sumber perantara atau datanya tidak didapatkan secara langsung.³⁸

a. Data Primer

Data primer ini didapatkan dengan cara langsung melalui beberapa metode misalnya, wawancara, observasi, atau dokumentasi.³⁹ *Primary data* pada penelitian ini yaitu observasi yang dilakukan melalui internet maupun sosial media dengan memanfaatkan hasil dari wawancara mentah dan belum diinterpretasikan oleh pihak lain. Penulis akan memilih informasi dari media ini sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian penulis. Misalnya sumber media online yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu akun media sosial resmi Uni Eropa. Seperti instagram @eucouncil, youtube European Commission

³⁷ Mohtar Masoed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

³⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Alfabeta Cv, 2013): 225.

³⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D".

@EuropeanCommission, X EU Council @EUCouncil, X EU in Ukraine @EUDelegationUA, dan X EU Publications @EUPublications.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung atau orang lain telah mengolah data tersebut.⁴⁰ Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian yang bersumber pada *website* resmi, sumber berita online, serta studi literatur yaitu sebagai berikut:

1. *Website* resmi

Data yang penulis gunakan adalah data yang berasal dari situs resmi Uni Eropa (https://european-union.europa.eu/index_en), situs resmi Komisi Eropa (https://commission.europa.eu/index_en), situs resmi Parlemen Eropa (<https://www.europarl.europa.eu/portal/en>), dokumen dan publikasi Dewan Uni Eropa (<https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/>), basis data Uni Eropa (<https://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/EuropeanInformation/EU-Databases>), Dokumen dan Informasi Pemerintah: Uni Eropa melalui Yale Library (<https://guides.library.yale.edu/govdocs/europeanunion>), Sumber dan informasi UE: Akses ke Dokumen UE (https://ec-europa-eu.libguides.com/EU_sources/access), situs resmi portal pemerintah Ukraina (<https://www.kmu.gov.ua/en/team>), dan situs Kementerian Luar Negeri Ukraina (<https://mfa.gov.ua/en>).

2. Sumber berita online

⁴⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D".

Sumber berita online yang digunakan pada penelitian ini yaitu EUobserver merupakan situs nirlaba terkemuka dengan dukungan anggota tentang urusan Uni Eropa (<https://euobserver.com/>), *European Sources Online* merupakan basis data dan layanan informasi secara gratis dengan tujuan untuk mendukung penelitian dan pemahaman mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Eropa (<https://www.europeansources.info/>), *An official website of the European Union News and Events* adalah sumber berita unggulan mengenai institusi dan badan Uni Eropa (https://european-union.europa.eu/news-and-event_en).

3. Buku

Buku digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Foreign Policy Analysis* oleh Jean-Frederic Morin dan Jonathan Paquin.

4. Artikel jurnal

Artikel jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah *European Union-Ukraine Relations Development Policy Historical Background and Current State* yang membahas mengenai sejarah hubungan UE dan Ukraina ditulis oleh Holovko dan Vodolaskova tahun 2022. Artikel jurnal kedua yaitu artikel jurnal yang berjudul *Ukraine and the European Union Enlargement at a New Crossroads* yang ditulis oleh Sapir Andre pada tahun 2022 yang membahas mengenai proses perluasan Uni Eropa dan kaitannya dengan Ukraina. Dan artikel jurnal terakhir adalah artikel jurnal yang berjudul *Ukraine As the EU Candidate State: Opportunities and Challenges* yang ditulis oleh Eva Polednikova pada tahun 2022 yang menjelaskan mengenai peluang dan tantangan Ukraina untuk menjadi negara anggota Uni Eropa.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini dilakukan melalui *data analysis process* menurut pandangan dari John W. Creswell dan John. David Creswell secara umum diawali dengan mengumpulkan data-data kualitatif kemudian memisahkan data tersebut yang disesuaikan dengan segmentasinya yang nantinya akan disatukan kembali untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴¹ Terdapat beberapa tahapan dalam *data analysis* menurut pandangan Creswell di dalam bukunya dengan judul *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* yaitu:

1. Mempersiapkan data untuk dilakukan analisis

Pada tahap ini, bagian pertama yang perlu dikerjakan oleh peneliti adalah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian, data yang telah didapatkan akan disiapkan dengan cara disortir yang berguna untuk mengetahui jenisnya yang tergantung pada darimana sumber data tersebut diperoleh. Contohnya penulis menggunakan dua sumber data yaitu *primary data* dan *secondary data*.

2. Membaca keseluruhan data

Dalam tahap kedua ini, peneliti membaca seluruh data yang sudah disiapkan sebelumnya yang bertujuan untuk membentuk pemahaman serta gambaran umum dari penelitian terkait informasi yang telah diperoleh. Melalui tahap ini peneliti akan membaca berbagai sumber yang dapat membantu peneliti

⁴¹ Creswell and Creswell, "Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches": 267-272.

dalam membentuk pemahaman umum terkait kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

3. Melakukan pengkodean terhadap keseluruhan data

Dalam tahap ini merupakan tahap dalam mengorganisir data yang sesuai dengan segmentasinya. Hal ini berkaitan dengan pengelompokan gambar, kalimat, maupun data lainnya ke dalam kategorinya masing-masing. Data yang didapatkan akan dikelompokkan sesuai dengan kategori kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina.

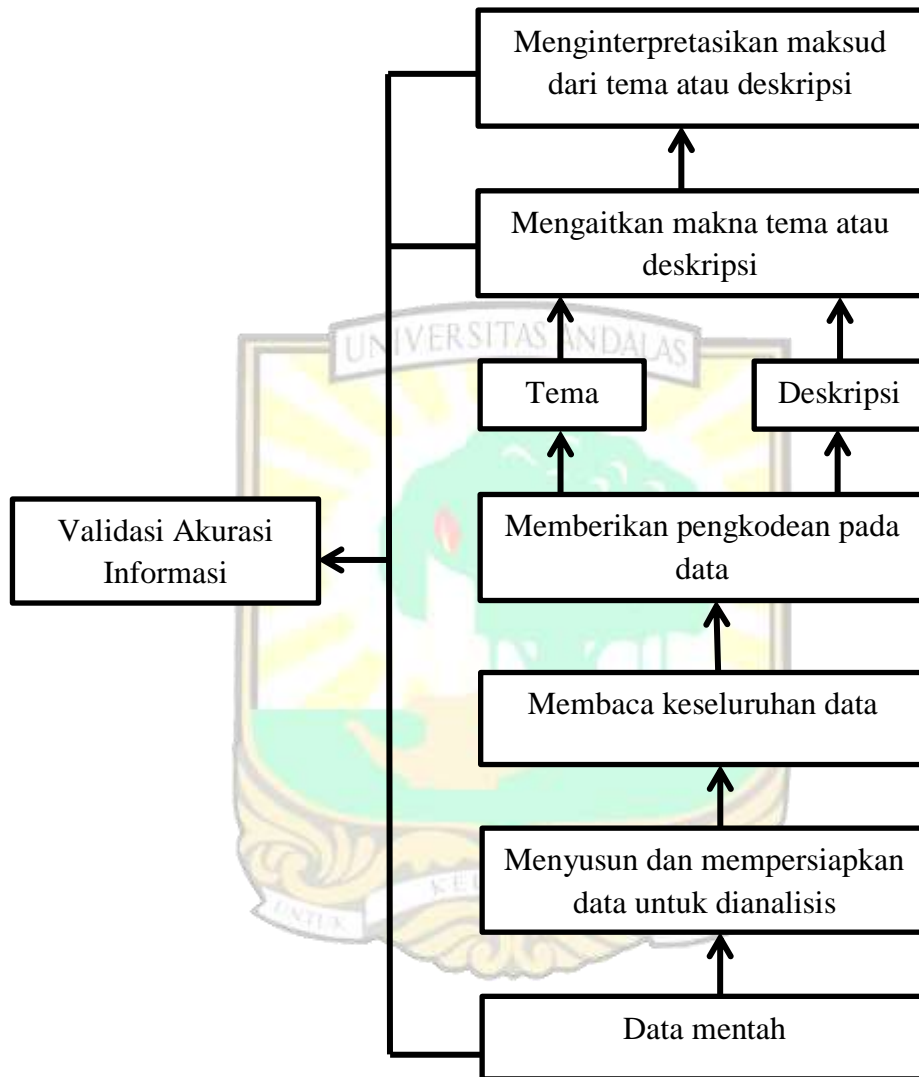
4. Membuat deskripsi dan tema

Kode yang sebelumnya telah dibuat dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi dan tema yang disesuaikan dengan kategori isu yang akan dianalisis. Maksud dari deskripsi adalah peneliti menjabarkan hasil dari temuannya yang berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh. Tema ini digunakan untuk diaplikasikan ke dalam penulisan penelitian dan berguna untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan kompleks.

5. Penyajian deskripsi dan tema

Deskripsi dan tema disajikan dalam bentuk narasi yang bertujuan untuk menyampaikan temuan dari penelitian. Penyajian deskripsi ini dapat didukung oleh objek visual, gambar, maupun tabel sehingga dapat memperdalam hasil yang didapatkan.

Kerangka dalam Analisis Data



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data

Sumber: Cresswell (2018)

1.9. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama dijelaskan tentang latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, studi literatur yang digunakan, kerangka konseptual, jenis penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, dan teknik pengumpulan serta analisis data.

Bab II Dinamika Hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina

Pada bab kedua menjelaskan tentang dinamika hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina, hingga Uni Eropa memberikan status kandidat kepada Ukraina. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Uni Eropa, sejarah negara Ukraina, dan hubungan antara Uni Eropa dengan Ukraina serta kerjasama yang terbentuk antara kedua mitra ini.

Bab III Kebijakan Luar Negeri dan Perluasan Uni Eropa ke Ukraina

Pada bab ketiga menjelaskan tentang kebijakan luar negeri dan perluasan wilayah Uni Eropa ke Ukraina yang mencakup kebijakan luar negeri Uni Eropa, perkembangan dan prosedur umum dalam kebijakan perluasan Uni Eropa, selanjutnya juga akan dibahas mengenai kebijakan perluasan wilayah Uni Eropa terhadap Ukraina, dan pemenuhan Kriteria Kopenhagen Uni Eropa oleh Ukraina (kriteria politik, kriteria ekonomi, dan kriteria *acquis*).

Bab IV Kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam Memberikan Status Kandidat kepada Ukraina

Pada bab keempat menjelaskan tentang analisis terkait masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian yakni mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam memberikan status kandidat terhadap Ukraina dengan menggunakan kerangka konseptual yaitu teori *foreign policy analysis* menurut J.F Morin dan J. Paquin.

Bab V Penutup

Pada bab kelima adalah bagian terakhir dalam penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan.

